

**STUDI ALOKASI KREDIT USAHA KECIL (KUK) OLEH PERBANKAN
DI SUMATERA BARAT**
(The study on KUK allocation by banks in West Sumatera)

Oleh: Niki Lukviarman

ABSTRAK

Perbankan sebagai lembaga penyedia dana untuk kebutuhan dunia usaha semakin dirasakan peranannya, terutama untuk usaha berskala kecil yang relatif terbatas akses pendanaannya kepada lembaga penyedia dana lainnya. Disisi lain disadari sepenuhnya bahwa usaha kecil dan koperasi mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap perekonomian nasional dan daerah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional. Namun demikian pihak perbankan di dalam memberikan kredit tetap memperhatikan kelayakan usaha yang dibiayai sebagai faktor paling utama. Dengan demikian dapat dianggap bahwa jumlah pemberian kredit pada setiap sektor ekonomi tertentu yang relatif besar dan dominan oleh pihak perbankan, merupakan sektor ekonomi yang dianggap layak dan mempunyai potensi untuk berkembang oleh pihak bank.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran pola alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh kelompok perbankan di Sumatera Barat, baik menurut sektor ekonomi yang dibiayai maupun alokasi kredit yang sama menurut kelompok perbankan yang menyalurkan kredit dimaksud. Hasil penelitian memperlihatkan sektor ekonomi dominan yang dibiayai oleh seluruh kelompok relatif mempunyai pola yang sama, dengan sektor-sektor; perdagangan, pertanian dan sektor lain-lain sebagai sektor yang paling dominan memperoleh KUK yang disalurkan. Dominasi sektor-sektor ekonomi tersebut di dalam penyaluran KUK juga dilakukan oleh ketiga kelompok bank yang sama di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini konsisiten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Base Line Economic Survey dengan proyeksi bahwa sektor-sektor dimaksud dianggap mempunyai potensi untuk dikembangkan di Sumatera Barat.

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan usaha kecil merupakan hal yang sangat penting karena mencakup kegiatan ekonomi masyarakat golongan menengah dan kecil serta sektor informal. Pengembangan usaha kecil diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran. Pada akhirnya lewat usaha dimaksud diharapkan upaya untuk mengurangi penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan mereka dapat tercapai.

Keberhasilan usaha kecil tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, potensi yang dimiliki pengusaha serta peluang pasar yang tersedia, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Tanpa tersedianya modal yang memadai, mengakibatkan usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan menjadi sulit untuk dibina dan dapat menghambat perkembangannya secara lebih lanjut. Dengan demikian faktor ketersediaan modal sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang diperlukan merupakan salah satu variabel yang penting untuk menunjang perkembangan usaha kecil.

Hasil penelitian *Baseline Economic Survey (BLS) Sumbar* menunjukkan bahwa hanya sebahagian kecil pengusaha kecil yang telah memanfaatkan fasilitas kredit dari bank. Lebih lanjut, studi tersebut memperlihatkan bahwa pengusaha kecil telah mempunyai akses terhadap lembaga keuangan terutama perbankan, namun belum dapat dikatakan baik. Rendahnya akses pengusaha kecil ke perbankan diantaranya disebabkan oleh faktor; (a) usaha kecil lebih mengutamakan meminjam uang pada keluarga terdekat jika membutuhkan tambahan modal, (b) kurangnya informasi kredit perbankan yang diterima serta (c) relatif jauhnya lokasi bank penyedia fasilitas dari tempat usaha mereka (LPUA,1994;143-144).

Dari sudut pandang pihak perbankan, permasalahan aksesibilitas kredit oleh usaha kecil terutama disebabkan oleh; (a) ketidakmampuan mereka menyusun proposal pengembangan usaha dan (b) pada umumnya tidak mampu menyediakan agunan kredit, serta (c) rendahnya kemampuan usaha kecil di dalam mengelola keuangan. Namun demikian pihak perbankan memandang penyaluran kredit KUK akan terus berkembang, terutama dengan tingginya minat berusaha dari masyarakat, terdapatnya bidang usaha dan jenis komoditas yang mempunyai prospek pasar yang baik serta adanya dukungan pembinaan yang konsisten dari pihak pemerintah (LPUA,1994;146).

Komitmen dan perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan peran usaha kecil dalam perekonomian nasional, dibuktikan melalui Paket Kebijakan 29 Januari 1990. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan penyempurnaan program perkreditan usaha kecil, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat ke arah kegiatan produktif (Siamat,1995;31). Salah satu dari empat butir garis besar kebijakan tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin kelangsungan tersedianya dana bagi usaha kecil dan kegiatan koperasi, semua bank diwajibkan menyediakan kredit dengan dana sendiri minimal sebesar 20% dari total portofolio kredit bank yang disalurkan untuk pengusaha kecil dalam bentuk KUK (Bank Indonesia,1998; 4).

Dengan adanya paket kebijakan tersebut, pihak perbankan dituntut untuk memainkan peranan lebih besar dalam memberdayakan usaha kecil. Namun demikian, pihak perbankan tetap saja harus mempertahankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menyalurkan dana bagi usaha kecil. Hal ini logis karena jika kredit yang disalurkan pihak perbankan, termasuk KUK, tidak dapat dimanfaatkan ke dalam usaha yang produktif oleh debiturnya maka kerugian akan ditanggung oleh bank pemberi kredit. Untuk itu bank akan tetap selektif di dalam menyalurkan kredit ini kepada debiturnya dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pemberian kredit yang sehat.

Dalam menyalurkan KUK, pihak bank tentunya akan memilih usaha kecil sesuai dengan kriteria umum yang ditetapkan terhadap usaha yang bisa dibiayai dengan kredit tersebut. Namun demikian, kriteria paling utama yang selalu diperhatikan oleh pihak bank adalah kelayakan usaha kecil yang akan dibiayai. Untuk itu pihak bank harus berupaya mengidentifikasi berbagai sektor ekonomi potensial dimana usaha kecil berada. Disamping itu pihak perbankan harus mengidentifikasi usaha kecil tertentu yang dianggap layak untuk dibiayai dan mampu memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkannya.

Studi BLS menunjukkan bahwa besarnya potensi permintaan terhadap KUK pada hakikatnya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan usaha kecil serta adanya kebutuhan tambahan modal yang diperlukan baik untuk pemantapan usaha yang ada maupun untuk perluasan pada usaha-usaha baru. Studi tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan potensi usaha kecil menurut sektor ekonomi dalam hubungannya dengan potensi permintaan terhadap KUK. Sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan di Sumbar adalah sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan disamping berbagai sektor lainnya dengan tingkat potensialitas lebih rendah (LPUA, 1994;178).

Sektor-sektor ekonomi yang dianggap potensial untuk dikembangkan relatif berbeda untuk setiap daerah tingkat II. Namun demikian survey tersebut secara umum merekomendasikan agar arah pengembangan yang dilakukan lebih diutamakan pada sektor-sektor: pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Rekomendasi ini disesuaikan dengan prioritas pengembangan usaha kecil di setiap daerah tingkat II yang ada di Sumbar oleh pemerintah daerah setempat.

Hasil studi tersebut memberikan implikasi bahwa penyaluran KUK selayaknya dilakukan kepada sektor-sektor ekonomi yang dianggap produktif. Produktivitas ini di dasarkan pada tingkat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah secara umum. Studi yang dilakukan terhadap penyaluran KUK di daerah Sumbar dari tahun 1987 hingga 1993 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tersebut sub-sektor usaha kecil seperti pertambangan dan penggalian, industri, listrik dan konstruksi serta perdagangan dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sejalan dengan itu alokasi KUK untuk sektor-sektor dimaksud juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama untuk sektor perdagangan, industri, pengangkutan serta jasa.

Perkembangan usaha kecil yang ditunjukkan oleh pertumbuhannya yang cukup tinggi tentunya membawa konsekuensi perlunya tambahan permodalan usaha. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan dan mengidentifikasi tingkat alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat. Dengan ditemukannya jumlah alokasi KUK untuk setiap sektor ekonomi, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

sektor-sektor ekonomi yang dianggap potensial oleh perbankan untuk dibiayai melalui KUK. Hal ini penting karena dengan ditemukannya peta alokasi KUK diharapkan terdapat masukan yang memberikan gambaran sektor-sektor ekonomi yang dianggap berpotensi untuk berkembang oleh perbankan di Sumatera Barat. Lebih lanjut dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu (BLS), diharapkan dapat diperoleh gambaran apakah sektor-sektor yang dibiayai oleh perbankan melalui KUK sesuai dengan berbagai sektor ekonomi yang dianggap potensial untuk dikembangkan.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif guna mengetahui secara umum peta alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat menurut sektor ekonomi dan jenis bank pemberi kredit. Untuk itu yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah alokasi KUK untuk usaha kecil di Sumatera Barat di setiap sektor ekonomi. Untuk tujuan penelitian ini data-data yang digunakan merupakan data penyaluran KUK oleh perbankan di Sumbar dari tahun 1992/93 hingga 1998/99. Data tersebut diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Bank Indonesia. Data jumlah alokasi KUK akan dibagi berdasarkan sektor-sektor ekonomi serta akan dibagi menurut jenis bank yang menyalurkannya (bank pemerintah, swasta nasional dan BPR).

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*) dan analisis kecenderungan (*trend analysis*) serta analisis *common size*. Semua peralatan analisis tersebut akan dilakukan secara horizontal (*horizontal analysis*) untuk sektor ekonomi dan secara vertikal (*vertical analysis*) untuk alokasi KUK menurut sektor untuk setiap tahun selama periode yang di analisis. Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membagi alokasi KUK di Sumbar berdasarkan sektor ekonomi untuk setiap tahun dan melakukan analisis terhadap perkembangannya selama periode analisis
2. Menentukan besarnya alokasi KUK berdasarkan sektor ekonomi dan menentukan sektor ekonomi dominan yang dibiayai serta mengidentifikasi kecenderungannya
3. Membandingkan sektor ekonomi dominan yang dibiayai perbankan di Sumbar dan membandingkannya dengan prioritas pengembangan usaha kecil menurut sektor ekonomi sebagaimana direkomendasikan oleh BLS
4. Membagi alokasi KUK berdasarkan jenis perbankan yang menyalurkannya dan mengidentifikasi sektor ekonomi dominan yang dibiayai oleh setiap jenis bank, serta melakukan analisis terhadap perkembangannya

C. Tujuan Penelitian

Sebagai penelitian deskriptif, secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peta alokasi KUK oleh perbankan di Sumbar menurut sektor ekonomi dan menurut jenis bank yang menyalurkan fasilitas KUK. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui alokasi KUK oleh perbankan di Sumbar berdasarkan sektor ekonomi dan menentukan sektor ekonomi dominan yang dibiayai serta melihat kecenderungannya selama periode analisis
- b. Untuk mengetahui perkembangan alokasi KUK di Sumbar menurut sektor ekonomi dan membandingkannya dengan prioritas sektor ekonomi dimana usaha kecil berada sesuai dengan sektor ekonomi yang akan dikembangkan menurut hasil penelitian BLS
- c. Untuk mengetahui alokasi KUK oleh setiap jenis bank yang ada dan melihat perkembangannya, guna mengetahui sektor-sektor ekonomi dominan yang dibiayai oleh setiap jenis bank melalui KUK

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pembahasan hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat menurut sektor ekonomi, diikuti dengan bahasan alokasi KUK menurut kelompok bank yang ada. Pembahasan berikutnya dilakukan untuk melihat kecenderungan atau pola alokasi KUK di Sumatera Barat menurut sektor ekonomi per kelompok perbankan yang ada dan membandingkannya dengan proyeksi hasil studi Base Line Economic Survey (BLS).

1. Alokasi KUK berdasarkan Sektor Ekonomi

Alokasi KUK di Sumbar berkembang cukup besar dari sebesar 325.035 juta pada tahun 1992/93 menjadi 1.043.274 juta pada akhir tahun 1998/99. Dari alokasi tersebut proporsi terbesar alokasi untuk tahun 1992/93 adalah untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel (48%) diikuti oleh sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi (21,36%). Sementara untuk sektor ekonomi lainnya, kecuali yang terkelompok dalam sektor lain-lain dan jasa-jasa, jumlah alokasi KUK menurut sektor ekonomi di tahun tersebut berjumlah kecil dari 5%. Jumlah alokasi terkecil terdapat pada sektor pertambangan (0,06%) dan sektor listrik, gas dan air (0,14%).

Perkembangan alokasi KUK untuk sektor yang sama di tahun-tahun berikutnya secara relatif mengikuti pola yang hampir seragam, dengan alokasi paling dominan masih terdapat pada sektor perdagangan, restoran dan hotel. Namun jika dibandingkan dengan tahun 1992/93 sebagai tahun dasar perbandingan, proporsi alokasi KUK untuk sektor ini semakin berkurang, walaupun dalam nilai nominal (rupiah) nilai alokasi mengalami peningkatan. Pola ini terlihat dari persentase alokasi dari keseluruhan KUK yang disalurkan menjadi 25,17% pada tahun 1995/96 hingga menjadi 23,48% pada tahun 1998/99. Sementara untuk tahun 1997/98 jumlah alokasi KUK secara umum untuk sektor ini menjadi semakin kecil bahkan mencapai nilai alokasi 21,37%.

Perkembangan yang sama dengan sektor perdagangan, restoran dan hotel, juga terjadi pada sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Dengan jumlah alokasi sebesar 21,36% pada tahun 1992/93, berkurang menjadi setengahnya (11,59%) pada tahun

1995/96. Jumlah alokasi KUK untuk sektor ini pada akhir tahun 1998/99 tinggal menjadi 7,92% atau hanya sepertiga dari jumlah alokasi untuk sektor yang sama di tahun 1992/93. Sebagaimana halnya sektor perdagangan, walaupun secara persentase alokasi KUK untuk sektor ini semakin kecil, namun dari nilai nominalnya ternyata mengalami peningkatan jumlah yang cukup berarti (dari Rp 69.343 juta pada tahun 1992/93 menjadi Rp 82.601 juta pada tahun 1998/99).

Alokasi KUK untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian secara nominal mempunyai perkembangan alokasi KUK yang cukup signifikan. Pada tahun 1992/93 jumlah alokasi KUK hanya berjumlah Rp 13.355 juta (4,11% dari seluruh KUK yang disalurkan pada tahun tersebut). Jumlah alokasi untuk sektor ini meningkat menjadi Rp 90.441 juta pada tahun 1995/96 atau menjadi 10,79% dari total KUK yang disalurkan di tahun dimaksud. Selanjutnya perkembangan alokasi KUK untuk sektor inikembali mengalami peningkatan yang cukup berarti hingga tahun 1997/98 (Rp 245.851 juta atau 18,26% dari total alokasi KUK). Sementara pada akhir tahun 1998/99 nilai alokasi KUK untuk sektor ini bahkan mempunyai alokasi KUK cukup signifikan (23,48% dari total alokasi KUK). Nilai tersebut bahkan lebih besar dari perkembangan sektor ekonomi yang dominan ditahun-tahun sebelumnya, seperti, sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian.

Sektor ekonomi lainya yang memperoleh jumlah alokasi semakin besar adalah sektor perindustrian. Alokasi KUK untuk sektor ini di tahun 1992/93 adalah Rp 7.449 juta (2,29% dari total alokasi KUK) menjadi lebih dari dua kali lipat (Rp 15.536 juta) pada tahun 1995/96. Walaupun peningkatn nilai nominal ini relatif besar, namun dibandingkan dengan total KUK yang disalurkan pada tahun yang sama, nilai alokasi untuk sektor ini hanya mencakup jumlah 1,85 % dari total KUK yang disalurkan. Persentase alokasi KUK untuk sektor ekonomi ini kembali mengalami penurunan untuk tahun-tahun berikutnya (menjadi hanya sebesar 1,63% pada tahun 1998/99), walaupun nilai nominal alokasi KUK meningkat menjadi Rp 17.504 juta untuk tahun yang sama.

Sektor ekonomi yang tergolong ke dalam kelompok lain-lain, juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dari sejumlah Rp 46.972 juta pada tahun 1992/93 menjadi Rp 630.652 juta untuk tahun 1997/98. Dengan nilai nominal demikian, maka alokasi KUK untuk sektor ini mencapai hampir setengah dari alokasi seluruh KUK yang disalurkan (46,84%) pada tahun yang sama. Sementara pada tahun 1998/99 jumlah alokasi KUK untuk sektor ini secara nominal maupun persentase alokasi dari seluruh KUK yang disalurkan, mengalami penurunan yang cukup signifikan secara nominal (Rp 389.339 juta) atau 37,32% dari seluruh alokasi KUK yang diberikan pada tahun tersebut.

Untuk sektor ekonomi lainnya, disamping berbagai sektor yang telah di bahas di atas, perkembangan alokasi KUK mengalami pertumbuhan yang tidak berarti (seperti untuk sektor pertambangan dan jasa-jasa yang mencakup dunia usaha dan sosial). Sementara untuk sektor ekonomi listrik, gas dan air jumlah alokasi KUK secara nominal maupun prioporsional relatif berkurang. Pola yang sama juga terjadi untuk sektor konstruksi yang

walaupun dari nilai nominal alokasi KUK mengalami peningkatan, namun dibanding seluruh alokasi KUK yang disalurkan persentase alokasi untuk sektor ini semakin berkurang.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa prioritas alokasi KUK dari sektor perdagangan, restoran dan hotel pada tahun 1992/93 hanya bertahan untuk tahun tersebut. Prioritas jumlah alokasi oleh perbankan di Sumbar dalam mengalokasikan KUK semenjak tahun 1993/94 berubah kepada sektor ekonomi lain-lain, dan kecenderungan ini terlihat sampai pada tahun 1998/99. Untuk tahun ini jumlah alokasi untuk sektor lain-lain menjadi Rp 389.339 juta atau 37,32% dari seluruh alokasi untuk tahun tersebut. Nilai alokasi untuk sektor ini merupakan nilai penyaluran KUK terbesar untuk sektor ekonomi yang ada, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian (24,95%) serta sektor perdagangan, restoran dan hotel (23,48%). Sementara sektor lainnya hanya memperoleh alokasi KUK yang relatif kecil (kurang dari 3%), kecuali sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi dengan jumlah alokasi 7,92%.

Implikasi dari kecenderungan semakin meningkatnya jumlah nominal KUK yang dialokasikan oleh perbankan di Sumatera Barat, dapat disebabkan oleh pengaruh berkembangnya usaha kecil untuk sektor ekonomi tertentu di Sumbar. Hal ini diperkuat dengan dugaan potensi berkembangnya sektor ekonomi tertentu sebagai kriteria utama untuk dapat menerima alokasi KUK. Sektor ekonomi yang memperoleh alokasi relatif besar dibanding sektor ekonomi lainnya adalah sektor pertanian dan perdagangan di dalam memperoleh alokasi KUK. Hal ini terlihat relevan dengan kebijaksanaan pemerintah dan kecenderungan umum dari perkembangan dunia usaha, khususnya yang berskala kecil untuk dibiayai melalui KUK oleh perbankan di Sumatera Barat.

2. Alokasi KUK menurut Kategori Bank Penyalur

Dari tiga kelompok bank yang menyalurkan KUK; Bank Pemerintah, Bank Swasta dan BPR, maka bank pemerintah merupakan penyalur kredit jenis ini yang paling dominan. Jumlah KUK yang disalurkan oleh bank pemerintah mencapai jumlah lebih dari 75%, bahkan untuk tahun 1998/99 jumlah penyaluran KUK oleh bank pemerintah hampir mencapai 90% dari seluruh KUK yang disalurkan di Sumatera Barat. Namun demikian perlu diteliti lebih lanjut alokasi KUK tersebut secara lebih spesifik untuk berbagai kelompok bank yang ada di Sumatera Barat.

Perkembangan alokasi KUK yang disalurkan oleh bank Pemerintah di Sumbar, didominasi oleh sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian serta sektor lain-lain (lebih dari 84% jumlah keseluruhan KUK yang dialokasikan oleh seluruh bank di Sumbar pada tahun 1992/93). Sementara untuk sektor lainnya; sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi; perdagangan, restoran dan hotel; serta sektor konstruksi, merupakan sektor dominan lainnya dengan persentase dari total alokasi lebih dari 72% jumlah KUK yang disalurkan oleh kelompok bank ini di tahun yang sama. Sementara sektor ekonomi yang memperoleh alokasi relatif kecil dari kelompok bank ini adalah sektor jasa-jasa (41,61%) dan sektor pertambangan (21,83%). Kecenderungan perkembangan alokasi

KUK oleh kelompok bank pemerintah ini terlihat relatif sama untuk tahun-tahun berikutnya.

Sementara alokasi KUK oleh bank-bank swasta di Sumbar hanya mencakup proporsi yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bank pemerintah. Penyaluran KUK oleh kelompok perbankan ini semakin lama semakin berkurang jumlahnya dari keseluruhan jumlah KUK yang dialokasikan oleh perbankan di Sumbar. Pada tahun 1992/93 proporsi KUK yang dialokasikan perbankan swasta mencakup jumlah hampir 23% dari total alokasi KUK, dan pada tahun berikutnya jumlah ini berkurang menjadi hampir setengahnya (hanya 13,17% dari jumlah KUK yang dialokasikan pada tahun tersebut). Sementara mulai tahun 1995/96 jumlah alokasi KUK oleh kelompok bank swasta mengalami penurunan cukup besar menjadi hanya 10,80%. Jumlah alokasi ini kembali mengalami peningkatan hingga tahun 1997/98 (13,46% dari jumlah alokasi KUK) serta menjadi kurang dari 10% pada akhir tahun 1998/99. Secara umum hingga akhir tahun 1998/99 jumlah alokasi KUK oleh kelompok bank swasta mengalami penurunan yang cukup berarti.

Alokasi KUK oleh kelompok bank BPR di Sumbar sangat kecil bila dibandingkan dengan kelompok bank pemerintah. Bila dibandingkan dengan kelompok bank swasta, alokasi KUK oleh kelompok BPR hanya seperlimanya. Secara umum selama kurun waktu yang dianalisis, kelompok bank BPR hanya menyalurkan KUK dalam proporsi yang relatif kecil atau kurang dari 2% total alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat. Namun demikian terlihat terjadinya peningkatan alokasi oleh kelompok bank ini dari hanya sejumlah 1,51% pada tahun 1992/93 menjadi 1,94% (1998/99). Walaupun tingkat pertumbuhan alokasi KUK oleh kelompok perbankan ini cukup besar, namun proporsi penyaluran KUK oleh BPR masih relatif kecil dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.

Secara umum alokasi KUK oleh kelompok perbankan di Sumatera Barat, didominasi oleh bank-bank pemerintah. Hal ini diduga berkaitan erat dengan kebijakan pengembangan usaha kecil dan koperasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi usaha kecil di dalam perekonomian nasional. Kelompok bank swasta menyalurkan KUK dalam jumlah lebih kecil dari bank pemerintah dan jumlah KUK yang disalurkan oleh kelompok perbankan ini secara proporsional menjadi semakin kecil. Pola alokasi KUK sebaliknya terjadi pada kelompok bank BPR, yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan proporsi alokasi KUK, walaupun secara nominal relatif kecil. Walaupun telah terdapat ketentuan pemerintah terhadap seluruh perbankan untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan koperasi (diantaranya melalui fasilitas KUK) dengan persentase tertentu, namun belum terlihat penerapan yang konsisten pada seluruh kelompok perbankan yang ada.

3. Alokasi KUK Menurut Kelompok Bank & Sektor Ekonomi

Sebagaimana telah dibahas pada bahagian sebelumnya bahwa alokasi KUK di Sumbar di dominasi oleh kelompok bank pemerintah dengan nilai alokasi mencakup hampir 90%

dari keseluruhan KUK yang disalurkan. Terdapat pola alokasi yang relatif sama berdasarkan sektor ekonomi oleh ketiga kelompok bank yang menyalurkan kredit ini. Secara umum alokasi KUK yang dominan terdapat pada; sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian; sektor perdagangan, restoran dan hotel; serta sektor lain-lain. Pada bahagian ini akan dilakukan analisis terhadap alokasi KUK menurut kelompok bank menurut sektor ekonomi yang memperoleh alokasi KUK oleh kelompok perbankan tersebut.

Untuk kelompok bank pemerintah sektor ekonomi dominan yang dibiayai pada tahun 1992/93 adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel (mencakup hampir 50% dari KUK yang dialurkan), diikuti oleh sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi serta sektor lain-lain. Mulai tahun 1993/94 penyaluran KUK oleh kelompok bank pemerintah didominasi oleh sektor lain-lain (42%) dan perdagangan, restoran & hotel (35,53%) serta sektor pengangkutan, pergudangan & komunikasi (12,53%). Untuk kedua tahun tersebut alokasi untuk sektor ekonomi lainnya oleh kelompok bank pemerintah berjumlah relatif kecil (kurang dari 4%). Untuk tahun-tahun berikutnya, alokasi KUK oleh kelompok bank pemerintah terhadap sektor perdagangan, restoran dan hotel cenderung mengalami penurunan, walaupun dari nilai nominal terlihat kecenderungan peningkatan nilai alokasi. Sementara alokasi KUK oleh kelompok bank pemerintah untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian, cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara persentase alokasi maupun nilai nominal penyaluran. Pola yang sama juga terlihat untuk sektor lain-lain yang mencapai nilai alokasi lebih dari 50% (tahun 1994/95 dan 1995/96). Sementara untuk tahun-tahun berikutnya hingga 1998/99 jumlah alokasi KUK oleh kelompok bank pemerintah untuk sektor ini, mengalami penurunan (menjadi 40,26%) atau menjadi Rp 370.162 juta.

Alokasi KUK yang dilakukan oleh kelompok bank swasta, didominasi oleh sektor ekonomi perdagangan, restoran dan hotel (46% untuk tahun 1992/93), diikuti oleh sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi (25,62%) serta sektor jasa-jasa (16,395). Disamping itu sektor ekonomi lainnya hanya memperoleh alokasi relatif kecil (kurang dari 5%) dan sektor pertambangan serta listrik, gas dan air memperoleh alokasi paling kecil (kurang dari 0,5%). Peta perkembangan alokasi KUK oleh kelompok bank ini mengalami perubahan yang berarti, dan sektor ekonomi yang memperoleh alokasi KUK dengan pertumbuhan paling tinggi terdapat pada sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian (hampir 40% dari total KUK yang disalurkan oleh perbankan Sumbar) di tahun 1998/99. Alokasi KUK oleh kelompok bank ini terhadap sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan, hingga mencapai jumlah alokasi KUK 20,93%. Namun demikian alokasi KUK untuk sektor ini tetap yang terbesar kedua setelah sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Dengan demikian terjadi perubahan alokasi dominan dari sektor perdagangan dari tahun 1992/93 hingga 1996/97 oleh kelompok perbankan ini, kepada sektor pertanian di tahun 1997/98 dan berlanjut hingga tahun berikutnya. Pola alokasi yang sama juga terjadi untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, hingga menjadi hanya sebesar 14,07% pada tahun 1998/99 dari seluruh alokasi KUK. Untuk sektor lain-lain, alokasi KUK oleh kelompok bank

swasta juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai lebih dari 15% alokasi total KUK oleh berbagai kelompok perbankan di Sumbar.

Proporsi alokasi KUK oleh kelompok BPR di Sumbar berjumlah relatif kecil dan hanya didominasi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Jumlah alokasi KUK untuk sektor ekonomi ini pada tahun 1992/93 mencapai jumlah 63% dari total alokasi alokasi KUK yang diberikan oleh BPR. Dominasi alokasi KUK oleh BPR untuk sektor ini masih berlanjut hingga tahun 1998/99, dengan nilai alokasi KUK lebih dari 50%. Sementara sektor ekonomi lainnya yang memperoleh alokasi KUK cukup besar oleh kelompok BPR ini adalah sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian (dengan jumlah alokasi hampir mencapai 10%). Sektor ekonomi yang memperoleh alokasi KUK dengan pertumbuhan cukup besar dari kelompok bank BPR ini adalah sektor jasa-jasa yang mencapai proporsi alokasi hampir 18%. Sektor ekonomi lain-lain yang tidak memperoleh alokasi oleh kelompok bank ini untuk tahun 1992/93 hingga 1993/94, mulai tahun 1994/95 memperoleh alokasi KUK dengan nilai cukup signifikan (12,40%) dan jumlah ini meningkat mendekati angka 15% pada akhir tahun 1998/99.

E. Kesimpulan

Alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat didominasi oleh kelompok bank pemerintah dengan nilai alokasi hampir mencapai nilai alokasi 90%. Sementara kelompok bank-bank swasta merupakan kelompok berikutnya yang memberikan alokasi cukup besar, diikuti oleh kelompok bank BPR dengan nilai alokasi kurang dari 2% dari seluruh KUK yang dialokasikan oleh perbankan di Sumbar. Temuan yang menarik adalah bahwa alokasi KUK oleh kelompok bank pemerintah selalu mengalami peningkatan proporsi dari tahun ke tahun. Pola yang sama juga terjadi pada kelompok BPR walaupun nilai nominal KUK yang dialokasikan oleh kelompok bank ini relatif kecil. Sementara alokasi KUK oleh kelompok bank swasta mengalami penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan dua kelompok bank lainnya. Implikasi dari temuan ini diduga karena bank pemerintah relatif fleksibel di dalam menyalurkan KUK sesuai dengan program pemerintah, dan hal ini tidak dimiliki kelompok bank swasta maupun BPR.

Alokasi KUK menurut sektor ekonomi mengalami perubahan yang cukup berarti selama kurun waktu 1992/93 hingga tahun 1998/1999. Secara umum tiga sektor ekonomi dominan seperti; sektor pertanian, perburuan & sarana pertanian; sektor perdagangan, restoran & hotel; serta sektor lain-lain. Sementara sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi yang pada tahun-tahun awal memperoleh jumlah alokasi cukup besar, pada tahun-tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pola alokasi yang demikian diduga terjadi karena berbagai sektor ekonomi dominan tersebut merupakan sektor ekonomi yang relatif berkembang dan mempunyai prospek yang cukup bagus dan berkembang di Sumatera Barat di masa yang akan datang.

Alokasi KUK menurut sektor ekonomi, jika dihubungkan dengan kelompok bank yang menyalurkan kredit tersebut, umumnya mempunyai pola yang sama. Ketiga sektor

tersebut tetap merupakan sektor dominan yang dibiayai oleh kelompok bank yang ada di Sumbar. Perbedaan alokasi menurut sektor oleh berbagai kelompok bank ini hanya terjadi berdasarkan urutan jumlah yang disalurkan. Sementara untuk kelompok bank BPR, sektor ekonomi yang dominan dibiayai melalui KUK, hanya sektor perdagangan, restoran dan hotel. Namun demikian sektor ini tetap saja merupakan bahagian dari tiga sektor utama yang dominan dibiayai melalui KUK oleh kelompok perbankan yang ada di Sumbar. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa seluruh kelompok bank di Sumbar melihat potensi sektor ekonomi yang sama untuk diberikan kredit jenis ini. Diduga kelompok perbankan yang menyalurkan KUK ini melihat prospek perkembangan yang sama terhadap berbagai bidang usaha yang tercakup ke dalam ketiga kelompok sektor ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh BLS, sektor ekonomi produktif yang potensial untuk dikembangkan di Sumbar adalah sektor ; pertanian, industri dan sektor perdagangan. Berdasarkan hasil temuan yang telah di bahas sebelumnya, hanya dua dari tiga sektor yang diproyeksikan ini yang dipersepsikan berkembang menurut kelompok perbankan. Dugaan ini muncul dengan besarnya proporsi alokasi KUK untuk sektor-sektor ekonomi tertentu yang memperoleh penyaluran KUK oleh perbankan di Sumbar. Namun demikian, hasil temuan yang diperoleh melalui penelitian ini masih konsisten dengan temuan BLS, terbukti dengan didominasinya alokasi KUK oleh perbankan di Sumbar oleh dua dari tiga sektor yang diproyeksikan BLS. Tidak termasuknya sektor industri memperoleh jumlah alokasi KUK dalam nilai relatif besar oleh kelompok perbankan, juga dapat disebabkan oleh upaya dari berbagai usaha yang bergerak di sektor ini untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan lainnya (seperti modal ventura).

Dengan membandingkan hasil temuan penelitian ini dengan proyeksi yang dilakukan oleh BLS, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian BLS dan pandangan sektor ekonomi yang dianggap produktif untuk berkembang dari sudut perbankan relatif sama. Namun demikian sektor ekonomi lainnya, seperti sektor industri , listrik dan konstruksi yang dianggap juga dianggap potensial untuk dikembangkan menurut studi tersebut, ternyata tidak menunjukkan perkembangan yang berarti selama kurun waktu yang dianalisis. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya pertumbuhan yang berarti dari jumlah alokasi KUK oleh kelompok perbankan pada bidang usaha yang berada di sektor ini dibandingkan dengan alokasi untuk sektor ekonomi lainnya. Namun demikian, diduga terdapat penyebab lain tidak berkembangnya alokasi KUK untuk sektor-sektor dimaksud yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

F. Saran dan Rekomendasi

Studi yang dilakukan melalui penelitian ini terbatas pada perkembangan alokasi KUK oleh perbankan di Sumbar menurut sektor ekonomi dan menurut kelompok bank. Identifikasi terhadap sektor ekonomi yang dianggap produktif ditinjau dari sudut perbankan dengan menggunakan acuan jumlah penyaluran KUK untuk berbagai sektor ekonomi. Secara umum hasil studi ini memperlihatkan hasil yang konsisten dengan

rekomendasi studi yang dilakukan BLS. Namun demikian perlu dilakukan penelitian lanjutan menyangkau pola alokasi KUK yang sama menurut daerah tingkat II di Sumatera Barat. Lebih lanjut, penelitian tersebut terutama ditujukan untuk melihat apakah pola yang sama dengan kajian umum untuk tingkat Sumatera Barat juga konsisiten dengan pola yang terdapat di berbagai daerah tingkat II.

Penelitian lanjutan tersebut juga diperlukan untuk memperlihatkan keceratan hubungan antara alokasi yang dominan terhadap sektor ekonomi tertentu di suatu daerah, dengan pendapatan regional daerah tersebut. Tegasnya perlu diteliti apakah sektor-sektor ekonomi produktif dari sudut pandang perbankan melalui pemberian KUK, mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Penelitian lanjutan ini diharapkan juga dapat mengidentifikasi perbedaan sektor ekonomi produktif di setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat, berdasarkan potensi ekonomi daerah masing-masing. Kajian terhadap hal ini penting, karena sektor ekonomi yang dominan untuk setiap daerah tingkat II di Sumbar relatif berbeda. Dengan demikian diharapkan dapat diidentifikasi kaitan antara setiap sektor ekonomi yang dibiayai oleh perbankan di setiap daerah, dengan kinerja perekonomian daerah yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia (1998) *Kumpulan Ketentuan Kredit Program dan Bantuan Teknis Bank Indonesia*, Jakarta
- (1999) *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat*, Padang
- Lembaga Penelitian Unand (1994) *Baseline Economic Survey Propinsi Sumatera Barat: Prioritas Pengembangan Usaha Kecil di Sumatera Barat*, Padang
- Petty, et al. (1996) *Basic Financial Management*, 6th edition, Prentice Hall Inc., Singapore
- Siamat, Dahlan (1995) *Manajemen Lembaga Keuangan*, PT. Intermedia, Jakarta
- Solomom Ezra dan John J Pringle (1978) *An Introduction to Financial Management*, Prentice Hall of India, India